

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, masih terdapat ketidaksempurnaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat karena banyaknya komponen laporan keuangan yang perlu dimasukkan sehingga sulit untuk mengidentifikasi secara wajar khususnya komponen aset daerah. Hal ini mengakibatkan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih sangat sedikit yang memperoleh wajar tanpa pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang mengharuskan semua pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), setiap pemerintah daerah membuat laporan keuangan berdasarkan kompilasi dari laporan keuangan SKPD (Yusuf, 2010:4).

Dewasa ini masyarakat telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin maju dan terus berkembang sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi dengan biaya yang relatif murah. Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah berlangsungnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Era transisi otonomi

adalah masa antara tahun 2000 hingga 2003 yang merupakan masa awal implementasi otonomi daerah (Mahmudi, 2010:3).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Sistem informasi akan bermanfaat apabila pemerintah daerah berpedoman pada Undang-Undang dan Permendagri yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian dari suatu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi, pebisnis, profesional maupun pada kalangan birokrasi. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup

penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Kegiatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan peraturan perundangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Penggunaan aplikasi ini sangat diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan menyajikan laporan keuangan dengan wajar, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Program aplikasi SIMDA ini dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan), maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih kepada pemerintah daerah terutama dalam penyusunan anggaran (Paramita dan Budiarta, 2014:251-266).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan suatu daerah sehingga perlu didukung dengan sistem informasi yang andal. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (*konsep value for money*), *partisipatif*, transparan, akuntabel dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi merupakan salah satu kunci strategis dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Pengukuran/evaluasi keberhasilan atau efektivitas SIPKD Pemerintah Kabupaten Bangka sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap pengelola keuangan daerah tentang nilai dan investasi sistem informasi sehingga mampu mengelola keuangan daerah. Untuk pengembangan sistem juga penting dilakukan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Karena kepuasan pengguna merupakan salah satu faktor yang penting untuk mengukur kesuksesan atau efektivitas sistem informasi dalam pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki sistem khusus untuk mengatur kegiatan operasi keuangannya, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Saat ini banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sehingga penyelenggaraan pemerintah di daerah harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan akurat. Peran teknologi informasi akan sangat membantu pengembangan kapasitas daerah untuk transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kabupaten Bangka diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan daerah. Sistem informasi dikatakan efektif apabila penyelenggaraan sistem informasi tersebut telah memberikan manfaat sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Informasi yang digunakan Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka diharapkan berjalan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan.

Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang berkualitas. Karena sistem merupakan alat yang dikendalikan sumber daya manusia maka yang berwenang melakukan penyusunan dan menjalankan kegiatan pengelolaan adalah sumber daya manusia dengan bantuan alat teknologi informasi berupa sistem informasi keuangan daerah. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam bidang akuntansi dan pelaporan terdapat pada sumber daya manusia yang sebagian bukan berlatarbelakang dari jurusan akuntansi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pelatihan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi efektivitas sistem informasi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka?
2. Apakah sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka berjalan efektif?

## **1.3 Batasan Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan untuk menganalisis bagaimana sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD

Kabupaten Bangka dan apakah efektif sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka.
2. Untuk menganalisis apakah sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka berjalan efektif.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Untuk menambah pengetahuan tentang keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan dari sistem informasi keuangan daerah di dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka.

##### **2. Kontribusi praktis**

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka

dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sistem informasi keuangan daerah yang berlaku.

Sebagai referensi mengenai sistem informasi keuangan daerah.

### 3. Kontribusi kebijakan

Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka dalam mengelola keuangan daerah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu pengertian sistem, sistem informasi, keuangan daerah dan pengertian efektivitas

### Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian mencakup lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang profil pemerintah DPPKAD Kabupaten Bangka dan gambaran dari sistem informasi keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Bangka.

#### Bab V Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang melibatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu baik secara praktis, teoritis dan metodologi serta keterbatasan penelitian.

